

WAWASAN NUSANTARA

Penulis : 1. Mutiara Putri NPM 2213053247
2. Febe Ririn Ariyani NPM 2213053277

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : 1. Drs. Rapani, M.Pd.
2. Siti Nuraini, M.Pd.



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah yang berjudul *Wawasan Nusantara* dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tepat waktu.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Rapani, M.Pd. dan Siti Nuraini, M.Pd. serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyumbangkan ide dan gagasannya untuk menyelesaikan makalah ini.

Penulis berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik. Demikian makalah ini penulis buat dan susun, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terdapat banyak kekurangan penulis mohon maaf.

Metro, 13 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara.....	6
B. Alasan Diperlukannya Wawasan Nusantara	7
C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Wawasan Nusantara.....	8
BAB III PENUTUP.....	11
A. Kesimpulan.....	11
B. Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wawasan nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi.

Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis, dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatarbelakangi pengembangan wawasan nusantara, mulai dari kondisi objektif geografi Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi hingga potensi di udara dan ruang antariksa. Tak hanya itu, ada juga aspek jumlah penduduk yang besar yang terdiri atas berbagai suku yang masing-masing memiliki budaya, adat istiadat/ tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam.

Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya Organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Wawasan nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara?
2. Apa Alasan Diperlukannya Wawasan Nusantara?
3. Bagaimana Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Wawasan Nusantara?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan penulisan sebagai berikut.

1. Mengetahui Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara;
2. Mengetahui Alasan Diperlukannya Wawasan Nusantara;
3. Mengetahui Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Wawasan Nusantara.

BAB II PEMBAHASAN

A. Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian etimologi dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan nusantara berasal dari dua kata wawasan dan nusantara. Wawasan dari kata wawas (Bahasa jawa) yang artinya pandangan. Sementara kata “nusantara” merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau atau kepulauan, sedangkan dalam Bahasa latin kata lusa berasal dari katan aesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Kata kedua yaitu “antara” memiliki padanan dalam Bahasa latin, in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. “antara” juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam Bahasa inggris yang berarti antar (antara) dan relasi.

Sedangkan dalam Bahasa sanksekerta. Kata “antara” dapat diartikan sebagai laut. Ada pendapat lain yang menyatakan nusa berarti pulau. Antaranya berarti diapit atau berada ditengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada ditengah benua atau samudra (pasha, 2008) tersebut dikemukakan. “Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan wawasan nusantara pada dasarnya digunakan sebagai jembatan penghubung dan pemersatu bagi wawasan lokal yang terdapat disetiap daerah atau geografis nusantara. Jadi, wawasan lokal pada dasarnya boleh berbeda dengan wawasan nasional, namun harus ada jembatan yang menghubungkan kedua wawasan tersebut. Selanjutnya, wawasan lokal tidak boleh bertentangan dengan wawasan nasional, dalam arti tidak boleh keluar dari konteks wawasan nasional.

Perbedaan wawasan lokal dengan wawasan nasional harus diartikan sebagai variasi dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang diangkat dari keanekaragaman budaya yang ada. Secara demikian, munculnya wawasan nasional merupakan resultane (hasil) dari interaksi wawasan lokal yang beraneka ragam.

Urgensi wawasan nusantara menekankan pada kesadaran warga Negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup (*living space*). Sekaligus menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme ini mendorong masyarakat untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mendorong masyarakat Indonesia untuk menunjukkan harkat dan martabatnya diantara bangsa-bangsa di dunia.

B. Alasan Diperlukannya Wawasan Nusantara

Hakikat Wawasan Nusantara adalah sebagai pemersatu keberagaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman yang ada dapat menyatukan bangsa Indonesia namun dapat juga disalahgunakan untuk memecahbelahkan bangsa Indonesia oleh pihak-pihak tertentu. Pengaruh globalisasi menimbulkan tantangan baru terutama pada bidang sosial budaya dan pertahanan-keamanan. Wawasan Nusantara akan meningkatkan komitmen masyarakatnya dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Wawasan Nusantara sangat berperan penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia (Kusrahmadi, 2011:13). Wawasan nusantara sangat penting untuk disosialisasikan dan direalisasikan pada masyarakat luas, terutama bagi pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Jadi alasan diperlukannya Wawasan Nusantara adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan harmonis pada setiap masyarakat Indonesia, serta untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia secara bersama-sama.

C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Wawasan Nusantara

Terdapat sumber historis (sejarah), sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya wawasan nusantara.

1. Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara

Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari perdana menteri Ir. H. Djuanda kartawidjaja yang pada tanggal 13 desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai deklarasi Djuanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut territorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis tutorial yang baru iini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah.

Sebelum keluarnya deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Zee En Maritime Kringen Ordinantie 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal dengan nama ordonasi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah hindia-belanda. Isi oedonasi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang- undang sebagai penjabarannya.

Setelah keluarnya deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah undang-undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundang-undang nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar deklarasi Djuanda ini ke forum international agar dapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional.

Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi

Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa Indonesia atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama “The United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara Kepulauan (Archipelago State). Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan. Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-undang No 17 tahun 1985. Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (continent shelf).

2. Latar Belakang Sosiologis Wawasan Nusantara

Berdasarkan sejarah, wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Djuanda 1957 sebagai perubahan atas ordonasi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan.

Namun seiring tuntunan perkembangan, konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam urusan GBHN 1998 dikatakan wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

Hal diatas, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjanjahan yang memecah belah bangsa, telah melatarbelakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah inusantara untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia.

3. Latar Belakang Politik Wawasan Nusantara

Selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional.

Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tentang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Wawasan nusantara yang bermula dari Deklarasi Djuanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan nusantara dimasukkan pada rumusan Pasal 25 A UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat tahun 2002.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori yang telah di susun di bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Urgensi wawasan nusantara menekankan pada kesadaran warga Negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup (*living space*). Sekaligus menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa Indonesia.
3. Alasan diperlukannya Wawasan Nusantara adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan harmonis pada setiap masyarakat Indonesia, serta untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia secara bersama-sama.
4. Terdapat sumber historis (sejarah), sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya wawasan nusantara.

B. Saran

Dengan adanya makalah ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis serta dapat memahami tentang Wawasan Nusantara. Jika terdapat kritik dan saran boleh disampaikan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusrahmadi. 2011. *Pentingnya Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional*.
Staffnew.Uny.
- Lutpiani, E. 2021. *Wawasan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan*.
- Margaretha, A. 2020. *Pentingnya Pemahaman Wawasan Nusantara Bagi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Eksistensi Negara*. Jakarta.
- Saputro, N.T. 2022. *Modul 6 Pendidikan Kewarganegaraan: Dinamika Historis dan Pentingnya Wawasan Nusantara*.
- Tim Dosen PKN. 2021. *Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara*. Bandung: Departemen Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia.